

ABSTRAK

Dengan melakukan analisis praktik audit investigasi BPK yang berfokus pada evaluasi aspek legal dalam memenuhi unsur tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, maka diharapkan dapat mengetahui batasan kewenangan yang dimiliki BPK dalam melakukan audit investigasi. Selain itu diharapkan dapat diketahui sejauh mana evaluasi aspek legal mampu menjembatani adanya *expectation gap* antara wewenang BPK sebagai pemeriksa dan kebutuhan pengguna laporan hasil pemeriksaan investigasi BPK.

Adapun pembahasan akan dibagi menjadi 2 tahap yaitu analisis prosedur dan analisis kasus. Analisis prosedur akan menunjukkan unsur pengembangan yang dilakukan dalam pemeriksaan investigasi untuk memenuhi unsur tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sedangkan analisis kasus akan menggunakan unsur pengembangan tersebut untuk menghubungkan antara kertas kerja pemeriksaan, laporan hasil pemeriksaan investigasi dan evaluasi aspek legal untuk mengetahui peranan evaluasi aspek legal BPK dalam memenuhi unsur tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 1999

Berdasarkan hasil analisis prosedur dan analisis kasus dapat disimpulkan bahwa upaya BPK dalam mengakomodasi Undang-Undang no 15 tahun 2004 ditunjukkan dengan memanfaatkan audit atas hal-hal yang berkaitan dengan keuangan yang telah dikembangkan sesuai dengan kriteria dalam prosedur pemeriksaan investigasi BPK untuk memenuhi unsur tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999. Selain itu dapat ditunjukkan bahwa evaluasi aspek legal BPK berperan penting dalam memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 dari sudut pandang kebutuhan pengguna laporan hasil pemeriksaan investigasi dalam hal ini penyidik karena dipandang unsur-unsur yang dikembangkan menurut sudut pandang pemeriksa dalam audit investigasi BPK belum memenuhi ekspektasi penyidik.

Kata kunci: BPK, Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, Pemeriksaan Investigasi, Evaluasi Aspek Legal